

IMPLEMENTASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM ALOKASI DANA DESA DI KAMPUNG MORUKU DISTRIK DEKAI KABUPATEN YAHUKIMO

Nappi Pahabol^{1*}, Yosephina Ohoiwutun², Untung Muhdiarta²

1) Mahasiswa Program Magister Kebijakan Publik Program Pascasarjana Universitas Cenderawasih

2) Program Magister Kebijakan Publik Program Pascasarjana Universitas Cenderawasih

* Email: nappyahabol838@gmail.com

Abstract :

This research analyzes the implementation of community empowerment through the Village Fund Allocation Program (ADD) in Moruku Village, Dekai District, Yahukimo Regency. This research aims to understand the effectiveness of ADD implementation and identify supporting and inhibiting factors in the process. The urgency of this research lies in the importance of optimizing ADD management to realize inclusive and sustainable village development. The approach used is a qualitative method with data collection techniques in the form of in-depth interviews, participatory observation, and documentation. Informants were determined using purposive sampling technique, involving village officials, communities, and related stakeholders. Data were analyzed using the Miles and Huberman interactive model. The results showed that the implementation of ADD in Moruku Village was not optimal due to low community participation and the dominance of the village head in managing funds. Based on Edwards III's policy implementation theory, analysis of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure reveals that communication is still limited, human resources and infrastructure are inadequate, and bureaucratic mechanisms are less effective in ensuring transparency and accountability. The main supporting factors are the availability of routinely allocated funds and the potential of local natural resources, while inhibiting factors include the weak capacity of village officials, lack of supervision, and low community literacy regarding fund management. This research emphasizes the need for improved communication between village governments and communities, strengthened human resource capacity, and structural reforms in ADD governance to make it more transparent and participatory. The main recommendation is to improve external and internal supervision and active involvement of the community in every stage of program implementation.

Abstrak :

Penelitian ini menganalisis implementasi pemberdayaan masyarakat melalui Program Alokasi Dana Desa (ADD) di Kampung Moruku, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo. Penelitian ini bertujuan untuk memahami efektivitas implementasi ADD serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam prosesnya. Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya optimalisasi pengelolaan ADD guna mewujudkan pembangunan desa yang inklusif dan berkelanjutan. Pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Informan ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, melibatkan aparat desa, masyarakat, serta pemangku kepentingan terkait. Data dianalisis dengan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi ADD di Kampung Moruku belum optimal akibat rendahnya partisipasi masyarakat dan dominasi kepala desa dalam pengelolaan dana. Berdasarkan teori implementasi kebijakan Edwards III, analisis terhadap komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi mengungkapkan bahwa komunikasi masih terbatas, sumber daya manusia dan infrastruktur kurang memadai, serta mekanisme birokrasi kurang efektif dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas. Faktor pendukung utama adalah ketersediaan dana yang dialokasikan secara rutin dan potensi sumber daya alam lokal, sedangkan faktor penghambat mencakup lemahnya kapasitas aparat desa, minimnya pengawasan, dan rendahnya literasi masyarakat terkait pengelolaan dana. Penelitian ini menekankan perlunya peningkatan komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta reformasi struktural dalam tata kelola ADD agar lebih transparan dan partisipatif. Rekomendasi utama adalah peningkatan pengawasan eksternal dan internal serta pelibatan aktif masyarakat dalam setiap tahapan implementasi program.

Keyword: Policy implementation, community empowerment, Village Fund Allocation, Moruku Village, Yahukimo.

PENDAHULUAN

Isu pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di era globalisasi dan transparansi semakin banyak dibicarakan dalam forum-forum diskusi yang diselenggarakan oleh pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, organisasi nasional dan internasional serta melalui artikel-artikel di media (Yefni, 2018). Singkatnya, ketidakpedulian masyarakat terhadap proyek pembangunan, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, penolakan masyarakat terhadap proyek pembangunan, ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dan solusi penyelesaian permasalahannya, tingkat penerimaan terhadap solusi pembangunan rendah inovasi dan tren masyarakat bergantung pada dukungan pemerintah terhadap kehidupan mereka, serta kritik terhadap hal tersebut. Pihak lain sering meragukan apakah masyarakat mempunyai potensi untuk berpartisipasi sebagai penggerak pembangunan. Sekalipun kritik di atas beralasan, masalah ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan menyalahkan masyarakat tanpa menyelidiki penyebabnya (Utomo, 2004; Roosinda, & Prasertijowati, 2017).

Untuk mencapai pemberdayaan dan kesejahteraan harus didukung dengan pengelolaan pembangunan yang partisipatif. Dalam struktur pemerintahan diperlukan perilaku pemerintahan yang jujur, terbuka, bertanggung jawab dan demokratis, sedangkan dalam struktur masyarakat harus dikembangkan mekanisme yang memberikan peluang partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan demi kebaikan bersama (Haris, 2014; Noor, 2012). Dalam pemberdayaan masyarakat, masyarakat merupakan subjek dan faktor penentu pembangunan. Dari perspektif ini, masyarakat dibimbing untuk mempertimbangkan kebutuhan, permasalahan dan peluang pembangunannya sendiri. Salah satu tugas pokok pemerintah daerah beserta

perangkatnya adalah memberdayakan masyarakat. Oleh karena itu, aparat pemerintah daerah senantiasa terpenggil untuk berperan penting dalam memberdayakan masyarakat di daerahnya.

Pentingnya pemberdayaan masyarakat juga didasari oleh gagasan pengelolaan sumber daya masyarakat (*local resource management*), yaitu suatu bentuk pengelolaan pembangunan yang menjawab tantangan pembangunan, khususnya kemiskinan, degradasi lingkungan, dan kekurangan masyarakat berpartisipasi dalam proses pembangunan yang menjadi perhatian mereka. Pemikiran ini merupakan mekanisme perencanaan pembangunan yang berpusat pada masyarakat yang menekankan pada teknologi pembelajaran sosial dan strategi pemrograman untuk meningkatkan kapasitas manusia. Kekuatan untuk mewujudkan (memberdayakan) masyarakat (Rahmat, & Mirnawati, 2020).

Berbagai peraturan terus mengalami perubahan seiring dengan perubahan dinamika kelembagaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Yahukimo yang menuntut pelayanan prima, sehingga setiap pegawai senantiasa dituntut untuk memberikan pelayanan yang bermutu, dengan motivasi yang baik diwujudkan melalui optimalisasi kinerja sesuai fungsional masing-masing pegawai yang tanggung jawab sesuai tugas pokok dan fungsinya, pemerintah daerah Kabupaten Puncak wajib melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan melakukan pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat mutlak diperlukan dan setiap pemerintah daerah beserta perangkatnya khususnya pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Yahukimo harus berperan besar dalam memberdayakan warganya, terutama dengan menggerak, mendorong atau memotivasi setiap individu agar memiliki kemampuan atau berdaya untuk menentukan nasib memperbaiki hidup menuju ke arah yang

lebih baik lagi sesuai dengan regulasi Permendesa No. 21 Tahun 2020 tentang pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang mengamanahkan pemerintah daerah sebagai pelaksana pemberdayaan masyarakat disebutkan dalam pasal 75 bahwa penggerak dari pemberdayaan masyarakat desa adalah desa, pemerintah pusa dan pemerintah daerah termasuk perangkat daerah, yang dalam konteks Kabupaten Yahukimo adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Yahukimo. Namun kenyataannya, upaya Pemerintah Daerah Yahukimo melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung untuk menjamin pemberdayaan masyarakat tidaklah mudah. Perilaku birokrasi daerah (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Yahukimo) pun masih kurang mendukung, komitmen yang ditunjukkan dari aparat pelaksana masih rendah, dan tingkat pendidikan dan partisipasi masyarakat rendah, permasalahan struktural sosial yang menghambat, isolasi masyarakat, pengaruh negatif ada, serta norma masyarakat dan mispersepsi yang berkembang di masyarakat merupakan permasalahan yang dihadapi oleh dinas pemberdayaan masyarakat kampung dan perangkat desa dalam menjalankan fungsi pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Yahukimo.

Dalam rangka melaksanakan pemberdayaan masyarakat kampung, terdapat berbagai macam program pemberdayaan yang merupakan kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah pusat dan daerah sebagai bentuk komitmen dalam memacu akselerasi pembangunan dengan memberdayakan masyarakat, agar aktif dan partisipatif sebagai subjek untuk menata pembangunan dari bawah. Salah satunya adalah melalui program alokasi dana desa, dimana pada program ini diperuntukkan sejumlah alokasi dana untuk pembangunan pada tingkat desa, yang kewajiban program yang direncanakan dan dijalankan, tak hanya sekedar berbentuk bangunan fisik, melainkan harus ada proporsi untuk pemberdayaan masyarakat. Agar, hasil dari pola pembangunan yang dijalankan tak

hanya sekedar berbentuk fisik, misalnya terkait dengan pembangunan kantor desa, infrastruktur jalan, jembatan dan lain sebagainya. Tapi juga ada bentuk program pemberdayaan masyarakat, atau program yang mengharuskan masyarakat untuk aktif dan partisipatif dalam melibatkan diri mereka untuk menjadi penggerak dalam pembangunan.

Dalam upaya mendukung pembangunan yang berkelanjutan serta pemberdayaan masyarakat di tingkat desa, alokasi Dana Desa telah menjadi instrumen vital yang diimplementasikan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas hidup di Kampung Moruku, Kabupaten Yahukimo, yang mana proses perhitungannya dilakukan dengan cermat berdasarkan berbagai parameter seperti jumlah penduduk, luas wilayah, tingkat kemiskinan, dan kesulitan geografis yang dihadapi di lapangan. Data anggaran yang telah disusun menunjukkan bahwa pengalokasian dana tidak dilakukan secara sporadis, melainkan melalui mekanisme yang terstruktur dan berkesinambungan, sehingga setiap tahunnya angka yang dicapai relatif mendekati satu sama lain. Hal ini mencerminkan adanya kestabilan dalam perencanaan serta pelaksanaan program pembangunan, di mana setiap penyesuaian dilakukan berdasarkan evaluasi berkala dan masukan dari berbagai stakeholder. Proses pengelolaan Dana Desa ini pun mengutamakan transparansi dan akuntabilitas, yang mana hasilnya diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan keuangan daerah. Dengan demikian, kestabilan angka alokasi tersebut menjadi indikator penting dalam mengukur efektivitas dan konsistensi upaya pemerintah dalam menghadirkan pembangunan yang inklusif di Kampung Moruku.

Kenaikan yang terjadi tidaklah drastis, melainkan merupakan penambahan yang relatif kecil, sehingga setiap angka antar tahun saling mendekati dan mencerminkan kontinuitas dalam strategi pendanaan. Pendekatan ini sangat strategis karena membantu menciptakan

stabilitas dalam perencanaan keuangan dan memberikan dasar yang kuat untuk program-program pembangunan yang bersifat jangka panjang. Pengalokasian dana yang seragam juga memberikan kemudahan bagi aparat desa dalam mengelola serta memonitor penggunaan Dana Desa secara efisien, sehingga setiap rupiah yang dicairkan dapat dimanfaatkan secara optimal. Dengan kata lain, pertumbuhan yang moderat dan konsisten ini mendukung terciptanya sinergi antara perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan di Kampung Moruku.

Stabilitas angka alokasi Dana Desa yang hampir mendekati antar tahun merupakan refleksi dari kebijakan pemerintah yang telah melakukan perencanaan dengan sangat matang, sehingga setiap komponen dalam anggaran dapat disesuaikan secara proporsional dengan kebutuhan di lapangan. Kebijakan ini tidak hanya menitikberatkan pada aspek kuantitatif, melainkan juga pada kualitas implementasi yang berdampak pada peningkatan infrastruktur dan layanan publik, sehingga hasil pengelolaan Dana Desa menjadi lebih terukur dan berkesinambungan. Proses penyesuaian angka yang saling mendekati tersebut dilakukan dengan melibatkan evaluasi internal dan masukan dari masyarakat, yang mana hal ini membantu mengidentifikasi kebutuhan prioritas serta menghindari lonjakan anggaran yang tidak realistis. Dengan demikian, kestabilan dan konsistensi alokasi ini memberikan sinyal positif kepada seluruh pemangku kepentingan mengenai komitmen pemerintah dalam mendorong pembangunan yang merata dan terintegrasi. Kesinambungan tersebut juga menjadi dasar bagi perencanaan ke depan, di mana setiap kenaikan atau penyesuaian angka dilakukan dengan sangat hati-hati dan berdasarkan data yang akurat serta relevan.

Alokasi dana desa yang dibagikan pada setiap kampung harus dimanfaatkan secara baik dan bijak, untuk dapat mensejahterahkan masyarakat di

Kampung. Akan tetapi, sejumlah permasalahan yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa adanya kesenjangan dalam pola pemanfaatan dan pengelolaan dana desa di kampung-kampung yang ada di Papua. Beberapa temuan menyebutkan bahwa serapan alokasi dana desa untuk program pembangunan masyarakat kampung tidak sesuai dengan besaran dana yang didapatkan dan diperuntukkan, sehingga munculnya ketidakpuasan masyarakat kepada aparat desa (Tanan, & Fonataba, 2022; Rizqi, dkk, 2024). Khususnya kepada kepala kampung, yang bahkan dinilai telah menyelewengkan anggaran tersebut (Tanawi, 2024; Banafanu, 2024; Raya, 2024; Aditra, 2018). Sehingga munculnya anggapan dari masyarakat terhadap aparat penyelenggara pemerintahan kampung yang tak transparan dalam pengelolaan dana kampung, khususnya kepala kampung yang dinilai tak dapat membedakan yang mana jabatan publik yang bertujuan untuk melayani masyarakat kampung (Leo, 2021; Anderson, 2020), dengan jabatan lainnya seperti kepala adat yang mutlak dan bersifat absolut (Aedah, 2017). Sedangkan, jabatan publik sebagai kepala kampung bertugas untuk melayani masyarakat dengan menjalankan kebijakan pemerintah dalam bentuk program pembangunan. Pada akhirnya, memunculkan ketidakpercayaan publik (*public dis-trust*) pada masyarakat (Harianto, dkk, 2022). Sehingga, hal ini menjadi landasan untuk melihat urgensi dari dilaksanakannya penelitian mengenai implementasi pelaksanaan dari program alokasi dana kampung di Kabupaten Yahukimo.

Kampung Moruku juga memiliki tantangan dalam implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat, khususnya terkait kondisi geografis dan aksesibilitas. Kampung ini terletak di daerah rawa dengan keterbatasan akses transportasi, terutama saat musim hujan ketika banjir kerap terjadi. Hal ini menyebabkan hambatan dalam pendistribusian barang serta pelaksanaan berbagai program pembangunan. Selain itu, harga bahan bangunan dan kebutuhan pokok di daerah

ini cenderung lebih mahal dibandingkan wilayah lain, sehingga menghambat pelaksanaan proyek-proyek pembangunan yang membutuhkan bahan dari luar daerah. Faktor lainnya adalah rendahnya kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi dalam program pembangunan, yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman mengenai manfaat jangka panjang dari program pemberdayaan yang telah dirancang.

Salah satu upaya strategis untuk mengatasi tantangan tersebut adalah dengan memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah, pemerintah kampung, serta lembaga pendamping pemberdayaan. Pemerintah Kabupaten Yahukimo telah berupaya meningkatkan konektivitas dengan membangun jaringan telekomunikasi serta memperbaiki infrastruktur dasar. Selain itu, program sosialisasi yang lebih intensif diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya partisipasi dalam program pemberdayaan. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga menjadi prioritas, terutama dengan memberikan pelatihan kepada aparat pemerintahan kampung agar dapat mengelola anggaran desa secara lebih efektif dan transparan. Pendekatan kolaboratif antara berbagai pihak diharapkan dapat mempercepat implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat secara lebih efektif.

Dengan demikian, Kampung Moruku memiliki potensi besar untuk berkembang jika tantangan-tantangan utama dalam pemberdayaan masyarakat dapat diatasi. Dengan sumber daya alam yang melimpah serta dukungan pemerintah dalam pembangunan infrastruktur dan peningkatan kapasitas masyarakat, kampung ini dapat menjadi model pemberdayaan masyarakat yang sukses di Kabupaten Yahukimo. Diperlukan strategi pembangunan yang berkelanjutan dengan memastikan bahwa setiap program yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Dengan adanya partisipasi aktif dari masyarakat serta dukungan dari berbagai pihak, diharapkan Kampung Moruku dapat menjadi kampung

yang lebih mandiri, maju, dan sejahtera di masa depan

Olehnya dalam rangka mendalami kebermanfaatannya implementasi program alokasi dana desa sebagai salah satu program yang diperuntukkan pada pemberdayaan masyarakat. Maka, saya akan mengkaji implementasi program alokasi dana desa pada salah satu kampung yang ada di Distrik Dekai Kabupaten Yahukimo, yakni di Kampung Moroku dengan menyoroti mengenai implementasi pemberdayaan masyarakat melalui Program Alokasi Dana Desa untuk meningkatkan dan memaksimalkan upaya untuk pemberdayaan masyarakat, agar masyarakat lebih aktif berpartisipasi dan menjadi penggerak dalam pembangunan pada tingkat akar rumput. Karena hanya dengan hal seperti itulah, pembangunan akan dapat terlaksana karena masyarakat sangat aktif berpartisipasi di dalamnya, serta tak lupa juga untuk menguraikan permasalahan yang ada di dalamnya, yang menjadi dukungan dan hambatan yang mendeterminasi pelaksanaan program tersebut.

Dengan demikian, Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi pemberdayaan masyarakat kampung melalui Program Alokasi Dana Desa di Kampung Moroku, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk memahami sejauh mana program tersebut berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kampung, serta mengeksplorasi tantangan yang dihadapi dalam proses implementasinya.

Gap dari hasil riset sebelumnya terletak pada kurangnya kajian mendalam yang secara spesifik menyoroti implementasi pemberdayaan masyarakat melalui *Program Alokasi Dana Desa* pada konteks wilayah yang memiliki karakteristik geografis ekstrem dan kondisi sosial-kultural khas seperti Kampung Moroku, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo. Sebagian besar studi terdahulu lebih menitikberatkan pada aspek

administratif, tata kelola keuangan, atau capaian fisik program tanpa mengelaborasi secara komprehensif faktor-faktor kontekstual seperti keterbatasan infrastruktur, rendahnya literasi anggaran di tingkat kampung, serta peran kultural tokoh adat dalam mempengaruhi efektivitas pemberdayaan. Padahal, dalam konteks Papua, termasuk Yahukimo, dinamika sosial dan tantangan geografis menjadi elemen yang sangat menentukan dalam keberhasilan program pembangunan berbasis partisipasi. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut, dengan fokus pada analisis implementasi yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga kontekstual, partisipatif, dan adaptif terhadap realitas lokal Kampung Moruku.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yang ingin menelisik mengenai penerapan suatu kebijakan, yakni implementasi pemberdayaan masyarakat kampung melalui Program Alokasi Dana Desa di Kampung Moruku Distrik Dekai Kabupaten Yahukimo. Untuk ini pada konteks penelitian ini akan memaparkan bagaimana implementasi pemberdayaan masyarakat kampung melalui Program Alokasi Dana Desa di Kampung Moruku Distrik Dekai Kabupaten Yahukimo yang juga akan mengungkap faktor-faktor penghambat dan pendukung dari pelaksanaan kebijakan tersebut. Sebagaimana yang diutarakan oleh Meyer & Greenwood (dalam Nugroho, 2003) bahwa tujuan dari pelaksanaan penelitian kebijakan publik adalah untuk memverifikasikan proposisi-proposisi mengenai beberapa aspek hubungan antara alat-tujuan dalam pembuatan kebijakan (mulai dari tahapan formulasi, implementasi, hingga pada tahapan evaluasi kebijakan), yang dalam konteks ini menyoroti mengenai implementasi pemberdayaan masyarakat kampung melalui Program Alokasi Dana Desa di Kampung Moruku Distrik Dekai Kabupaten Yahukimo.

Penelitian ini memfokuskan pembahasan pada implementasi pemberdayaan masyarakat kampung melalui Program Alokasi Dana Desa di Kampung Moruku Distrik Dekai Kabupaten Yahukimo yang secara spesifik ingin implementasi implementasi pemberdayaan masyarakat kampung melalui Program Alokasi Dana Desa di Kampung Moruku Distrik Dekai Kabupaten Yahukimo dan faktor pendukung dan penghambatnya. Kemudian, berusaha untuk menelisik upaya-upaya penguatan yang dilakukan untuk peningkatan pemberdayaan masyarakat kampung melalui Program Alokasi Dana Desa di Kampung Moruku Distrik Dekai Kabupaten Yahukimo.

Informan yang dilibatkan dalam penelitian ini ditentukan secara *snowball*, dengan pertama-tama menetapkan informan kunci (*key Informant*). Jumlah informan yang dilibatkan belum bisa ditentukan, akan tetapi perencanaan kategorisasi informan yang terlibat adalah seluruh (atau yang representatif) aparat pemerintahan dalam lingkup Dinas Pemberdayaan masyarakat kampung, yang berkaitan langsung pada aspek pemberdayaan masyarakat. Aparatur Kampung Moruku serta Masyarakat kampung Moruku. Kategorisasi informan sengaja dilakukan untuk mengklaster dari pihak pemerintah dan masyarakat, agar gambaran mengenai penilaian dan dampak yang ditimbulkan dari suatu kebijakan tersebut yang didapatkan menjadi dua arah, dan mencegah bias penelitian serta dapat memperlihatkan objektivitas penelitian.

Teknik Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wawancara mendalam dan Observasi Aktif. Wawancara mendalam digunakan untuk memperoleh data terkait penilaian terhadap penerapan kebijakan pemberdayaan masyarakat yang berada pada ruang lingkup Kampung Moruku Distrik Dekai Kabupaten Yahukimo, Kemudian, Teknik Observasi digunakan untuk *crosscheck* data yang diperoleh melalui wawancara. Observasi dilakukan dengan tujuan untuk menelusuri wujud

konkret dari hasil implementasi pemberdayaan masyarakat kampung melalui Program Alokasi Dana Desa di Kampung Moruku Distrik Dekai Kabupaten Yahukimo.

Adapun Langkah-langkah yang dilakukan untuk menganalisis data adalah *pertama*, mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Langkah ini melibatkan transkripsi wawancara, *scanning* materi, mengetik data lapangan, atau memilah-milah dan menyusun data tersebut kedalam jenis-jenis yang berbeda-beda bergantung pada sumber informasi (Creswell, 2012:276). Kemudian, membaca keseluruhan Data. Pada Tahap ini, peneliti menulis catatan-catatan khusus atau gagasan umum mengenai data yang telah diperoleh (Creswell, 2012:276). Lalu, menganalisis lebih detail dengan *coding* data. Rossman & Rallis mengungkapkan bahwa *coding* merupakan proses mengolah materi dan informasi menjadi segmen-segmen tulisan sebelum memaknainya (Dalam Creswell, 2012:276). Pada tahap ini data yang telah dikumpulkan tersebut yang berupa kalimat atau paragraf atau gambar disegmentasi ke dalam bentuk kategori-kategori, kemudian melabeli kategori tersebut dengan istilah khusus. Selanjutnya menerapkan *coding* untuk mendeskripsikan topik untuk dianalisis. Pada tahap ini peneliti membuat deskripsi dari proses *coding*. Deskripsi ini melibatkan usaha penyampaian informasi secara detail mengenai topik dan fokus penelitian dalam *setting* tertentu. Langkah ini bertujuan untuk mendeskripsikan informasi yang telah di *coding* setelah itu di analisis lebih lanjut (Creswell, 2016:282-283). Berikutnya, penyajian kembali tema dan deskripsi dalam bentuk narasi. Pada tahap ini, hasil analisis disajikan dalam bentuk narasi. Dalam pembahasan ini peneliti mencoba untuk menghubungkan tema-tema yang ada sebelumnya dari hasil *coding* kemudian di sajikan dalam bentuk narasi. (Creswell, 2016:283) terakhir adalah menginterpretasi dan memaknai Data. Interpretasi merupakan makna yang berasal dari perbandingan antara hasil penelitian dengan informasi yang berasal

dari studi literatur atau *teori*. (Creswell, 2016:285)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Alokasi Dana Desa di Kampung Moruku Distrik Dekai Kabupaten Yahukimo

Pemberdayaan masyarakat merupakan strategi penting dalam mendorong pembangunan berbasis partisipasi lokal, terutama di daerah pedesaan seperti Kampung Moruku, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo. Salah satu instrumen utama yang digunakan untuk tujuan ini adalah program Alokasi Dana Desa (ADD), yang bertujuan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengelola sumber daya, memperbaiki infrastruktur lokal, dan memperkuat sistem pemerintahan kampung. Namun, pelaksanaan program ADD di Kampung Moruku menghadapi berbagai tantangan, termasuk rendahnya pemahaman masyarakat tentang pengelolaan dana, koordinasi yang lemah antara aparat pemerintah kampung dan distrik, serta kendala aksesibilitas. Penelitian yang dilakukan oleh Christoffel, Batubara, dan Widagda (2022) menunjukkan bahwa keberhasilan ADD sangat bergantung pada keterlibatan aktif masyarakat serta peningkatan kapasitas aparatur pemerintah kampung melalui pelatihan dan pendampingan. Oleh karena itu, implementasi ADD di Kampung Moruku membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam perspektif teori implementasi kebijakan menurut Edwards III, keberhasilan implementasi suatu kebijakan, termasuk Alokasi Dana Desa (ADD), sangat dipengaruhi oleh empat indikator utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Pertama, komunikasi yang efektif diperlukan untuk memastikan bahwa tujuan, prosedur, dan mekanisme ADD dipahami oleh semua pihak, mulai dari

pemerintah daerah, aparat kampung, hingga masyarakat. Kedua, ketersediaan sumber daya, baik berupa dana, tenaga kerja, maupun sarana dan prasarana, menjadi faktor penentu keberlanjutan program. Ketiga, disposisi atau sikap pelaksana kebijakan yang mencakup komitmen, motivasi, dan integritas aparat kampung sangat penting untuk mendorong implementasi yang sesuai dengan aturan. Keempat, struktur birokrasi yang mendukung, termasuk pembagian tugas yang jelas dan koordinasi yang baik antara pemerintah kampung dan distrik, dapat mempercepat proses implementasi. Dalam konteks Kampung Moruku, keempat indikator ini perlu diperkuat untuk mengatasi tantangan yang ada dan memastikan bahwa program ADD benar-benar berdampak pada pemberdayaan masyarakat (Edwards, 1980). Adapun pemaparannya dijelaskan secara spesifik sebagai berikut ini:

Komunikasi

Indikator komunikasi dalam implementasi kebijakan memegang peranan kunci dalam memastikan tujuan dan mekanisme kebijakan dipahami dengan jelas oleh semua pihak yang terlibat. Menurut Edwards III (1980), komunikasi yang baik mencakup tiga aspek utama, yaitu transmisi informasi, kejelasan pesan, dan konsistensi arahan. Informasi kebijakan harus dapat disampaikan secara efektif dari tingkat pembuat kebijakan hingga pelaksana di lapangan, termasuk aparat pemerintah kampung dan masyarakat. Kejelasan pesan menjadi penting agar tidak ada penafsiran yang berbeda yang dapat menghambat pelaksanaan kebijakan. Selain itu, konsistensi dalam penyampaian arahan memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan tetap sesuai dengan tujuan awal yang telah dirumuskan. Dalam konteks implementasi Alokasi Dana Desa di Kampung Moruku, efektivitas komunikasi menjadi tantangan tersendiri, terutama dengan keterbatasan akses informasi dan minimnya fasilitas komunikasi di wilayah tersebut. Oleh karena itu, diperlukan strategi komunikasi yang tepat untuk mengatasi hambatan ini dan mendukung keberhasilan program.

Implementasi pemberdayaan masyarakat melalui Program Alokasi Dana Desa (ADD) di Kampung Moruku, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, sangat dipengaruhi oleh komunikasi yang efektif antara pemerintah kampung dan masyarakat setempat. Dalam hal ini, Kepala Kampung dan aparat kampung Moruku berperan penting sebagai pelaksana administrasi, yang menyiapkan alat bantu komunikasi dan informasi seperti komputer dan telepon untuk memastikan transmisi informasi yang terdata. Dengan menggunakan alat ini, informasi yang berkaitan dengan kebijakan dan pelaksanaan program pemberdayaan dapat disampaikan secara jelas dan sistematis. Komunikasi yang terorganisir dengan baik memungkinkan informasi dapat diterima oleh semua pihak terkait, mulai dari aparat kampung hingga masyarakat, sehingga mempermudah pemahaman mereka terhadap program yang dijalankan.

Salah satu bentuk komunikasi yang digunakan adalah penyampaian informasi melalui surat dan papan informasi yang dipasang di kantor desa. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk melihat dan membaca informasi yang relevan dengan pelaksanaan program ADD. Papan informasi ini berfungsi sebagai sarana penyebaran informasi yang transparan dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat kampung, yang memastikan bahwa informasi yang diberikan tidak hanya sampai kepada aparat kampung, tetapi juga masyarakat umum. Keberadaan papan informasi ini juga menciptakan saluran komunikasi terbuka antara pemerintah kampung dan masyarakat, sehingga masyarakat dapat lebih aktif terlibat dalam proses pemberdayaan melalui ADD.

Namun, selain metode komunikasi tertulis, komunikasi langsung antara Kepala Kampung dan aparat kampung dengan masyarakat juga sangat penting. Pendekatan ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk bertanya, memberikan umpan balik, dan memperoleh klarifikasi terkait implementasi program. Hal ini meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaan program

pemberdayaan, yang merupakan tujuan utama dari ADD. Komunikasi langsung juga memungkinkan adanya interaksi yang lebih personal dan mendalam, sehingga masyarakat lebih memahami tujuan dan manfaat dari program yang dijalankan serta dapat ikut berperan dalam keberhasilan program tersebut.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nugroho (2018), komunikasi yang efektif dalam implementasi kebijakan sangat bergantung pada kesesuaian antara saluran komunikasi yang digunakan dan karakteristik penerima informasi. Dalam konteks Kampung Moruku, penggunaan kombinasi komunikasi tertulis dan verbal sangat relevan, karena mampu menjangkau masyarakat yang mungkin memiliki akses terbatas terhadap teknologi, namun tetap bisa mendapatkan informasi yang jelas melalui metode yang lebih tradisional seperti papan informasi dan percakapan langsung.

Sumber Daya

Indikator sumber daya dalam implementasi kebijakan memegang peranan penting karena tanpa sumber daya yang memadai, tujuan kebijakan tidak dapat tercapai secara efektif. Sumber daya mencakup berbagai aspek, seperti keuangan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta akses terhadap informasi yang relevan. Dalam konteks implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) di Kampung Moruku, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, keterbatasan sumber daya menjadi salah satu kendala utama. Meskipun dana telah dialokasikan, tantangan seperti kurangnya tenaga terampil, minimnya fasilitas pendukung, dan aksesibilitas yang sulit menghambat optimalisasi program. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kapasitas sumber daya, baik melalui pelatihan aparatur kampung maupun penyediaan infrastruktur yang lebih baik, menjadi langkah strategis dalam mendukung keberhasilan ADD (Christoffel, Batubara, & Widagda, 2022).

Sumber daya memainkan peran penting dalam menentukan keberhasilan program tersebut. Berdasarkan kutipan tersebut, jelas bahwa pemerintah kampung Moruku memprioritaskan penyediaan sumber daya manusia yang kompeten untuk menjalankan program-program pemberdayaan. Aparat pemerintahan kampung, Badan Musyawara Kampung, tenaga teknis, dan pendamping lokal diberikan upah kerja dan honor tetap sebagai tenaga pelaksana yang profesional. Ini sesuai dengan konsep bahwa sumber daya manusia yang berkualitas dan terlatih menjadi faktor kunci dalam implementasi kebijakan yang sukses (Grindle, 1980). Dengan adanya tenaga ahli yang terlibat, program pemberdayaan masyarakat memiliki potensi lebih besar untuk diterjemahkan dengan baik dan efektif ke dalam tindakan nyata di tingkat kampung.

Namun, meskipun secara kuantitas jumlah sumber daya manusia di Kampung Moruku cukup banyak, kualitasnya masih minim. Oleh karena itu, pemerintah kampung berusaha membiayai pendidikan mahasiswa-mahasiswi kampung untuk menambah kualitas sumber daya manusia di masa depan. Hal ini mencerminkan upaya berkelanjutan dalam membangun kapasitas lokal, yang juga ditemukan dalam penelitian oleh Weller (1999) yang menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung pelaksanaan kebijakan secara efektif. Keterbatasan kualitas sumber daya manusia yang ada saat ini dapat menghambat kelancaran pelaksanaan program, tetapi langkah-langkah yang diambil untuk membiayai pendidikan akan meningkatkan kemampuan lokal dalam jangka panjang.

Selain itu, penyediaan sarana dan prasarana menjadi faktor penunjang yang tidak kalah penting dalam implementasi ADD. Pemerintah kampung Moruku telah mempersiapkan berbagai alat bantu, seperti mesin giling sagu, mesin giling pasir, dan alat transportasi untuk mendukung kelancaran program. Ini menunjukkan bahwa ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai dapat mempermudah

proses pelaksanaan kebijakan, seperti yang dijelaskan oleh Van Meter dan Van Horn (1975) dalam model implementasi kebijakan mereka, yang menyatakan bahwa sumber daya fisik dan material yang cukup dapat mempercepat pencapaian tujuan kebijakan. Dengan adanya fasilitas seperti perahu dan motor, serta akses jalan yang memadai, distribusi dan akses informasi serta material dapat dilakukan lebih efisien, memungkinkan program pemberdayaan masyarakat berjalan lebih lancar.

Kondisi geografis Kampung Moruku yang aman dan kaya akan sumber daya alam memberikan keuntungan bagi implementasi ADD. Letaknya yang hanya 10 kilometer dari Kota Dekai dan lingkungan yang masih berupa rawa hutan lindung memberikan stabilitas yang menguntungkan bagi pembangunan. Selain itu, sumber daya alam yang tersedia di sekitar kampung, seperti kayu, batu, dan tenaga kerja lokal, dapat dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur kampung. Dalam konteks ini, kondisi geografis dan sumber daya alam yang melimpah dapat memfasilitasi keberhasilan program pemberdayaan masyarakat, sebagaimana juga dijelaskan oleh McCool dan Guthrie (2001), yang menekankan pentingnya pemanfaatan sumber daya alam lokal dalam mendukung kebijakan pembangunan.

Disposisi

Indikator disposisi dalam teori implementasi kebijakan merujuk pada sikap, motivasi, dan komitmen dari para pelaksana kebijakan, baik itu pejabat pemerintah maupun aparat kampung, dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Disposisi yang baik sangat penting karena akan mempengaruhi sejauh mana kebijakan dapat diimplementasikan dengan efektif dan sesuai tujuan. Dalam konteks program Alokasi Dana Desa (ADD) di Kampung Moruku, disposisi aparat kampung memainkan peranan yang krusial. Jika aparat pemerintah kampung memiliki sikap yang positif, seperti kesungguhan dalam mengelola dana dan komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,

maka pelaksanaan program akan lebih lancar dan dapat mengatasi hambatan-hambatan yang ada, seperti kurangnya pemahaman atau koordinasi. Sebaliknya, jika disposisi aparat lemah atau tidak memiliki motivasi yang cukup, maka program tersebut cenderung gagal atau tidak mencapai hasil yang diinginkan. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan disposisi aparat kampung sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan implementasi ADD di Kampung Moruku.

Sikap pelaksana kebijakan terlihat positif, di mana pemerintah kampung menunjukkan kesiapan dalam mengamankan program pemberdayaan masyarakat melalui Alokasi Dana Desa (ADD). Komitmen yang tinggi dari aparat kampung, seperti kepala kampung dan perangkat kampung permanen, terlihat jelas melalui kesiapan mereka untuk menerima hak upah kerja dan melaksanakan tugas administratif untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program. Hal ini mencerminkan sikap yang proaktif dan bertanggung jawab dalam menjalankan program tersebut.

Selain itu, motivasi pelaksana kebijakan di Kampung Moruku untuk memberdayakan masyarakat juga dapat dilihat dari adanya kelompok profesional penyusun program desa yang bekerja sesuai dengan prestasi kerja mereka. Pemberian upah kerja yang disesuaikan dengan kinerja ini menjadi salah satu cara untuk meningkatkan motivasi dan memastikan bahwa pelaksanaan program sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Keberadaan kelompok profesional ini memberikan gambaran bahwa para pelaksana kebijakan memiliki kesadaran untuk melakukan yang terbaik dalam pemberdayaan masyarakat melalui alokasi dana yang ada, dengan hasil yang dapat dievaluasi berdasarkan prestasi kerja.

Sistem konektivitas antara perangkat kampung, mulai dari kepala kampung hingga badan musyawarah kampung dan anggotanya, juga memperlihatkan disposisi yang baik. Konsistensi dan keharmonisan dalam menjalankan urusan pemerintahan

kampung menunjukkan adanya kerjasama yang efektif di antara para pelaksana kebijakan. Hal ini sangat penting karena tanpa kerjasama yang baik, implementasi kebijakan tidak akan berjalan lancar. Disposisi yang positif dalam hal saling menghormati dan menjalankan tugas sesuai peran fungsinya menunjukkan bahwa para pelaksana kebijakan di Kampung Moruku memiliki sikap yang baik dalam menjaga integritas dan keselarasan dalam pengelolaan sumber daya.

Namun, keberhasilan implementasi kebijakan juga sangat bergantung pada sikap dan disposisi yang stabil dalam jangka panjang. Dalam hal ini, pemberian insentif berupa upah kerja yang jelas dan terstruktur, serta penghargaan terhadap prestasi, diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas dan dedikasi aparat kampung. Meskipun demikian, tantangan masih tetap ada, terutama dalam hal pengelolaan sumber daya manusia yang terbatas dalam hal kualitas. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih lanjut untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi pelaksana kebijakan guna menjamin keberlanjutan dan kesuksesan program pemberdayaan masyarakat.

Struktur Birokrasi

Indikator struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan merujuk pada bagaimana sistem administrasi dan organisasi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, dibangun untuk mendukung proses pelaksanaan kebijakan. Struktur birokrasi yang efisien dan efektif sangat penting untuk memastikan bahwa program kebijakan dapat diterjemahkan dengan baik ke dalam tindakan nyata di lapangan. Dalam konteks Alokasi Dana Desa (ADD) di Kampung Moruku, struktur birokrasi yang baik mencakup pembagian tugas yang jelas antara aparat pemerintah kampung dan pemerintah distrik, adanya saluran komunikasi yang terbuka dan lancar, serta mekanisme koordinasi yang memungkinkan semua pihak terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Tanpa adanya struktur birokrasi yang mendukung, proses implementasi dapat

terhambat, menyebabkan kebijakan tidak dapat dijalankan secara optimal. Oleh karena itu, keberhasilan ADD sangat bergantung pada sistem birokrasi yang terorganisir dengan baik, yang mendukung aliran informasi dan pengelolaan sumber daya yang tepat.

Salah satu indikator penting dalam implementasi kebijakan adalah pembagian tugas yang jelas, yang tercermin pada peran Kepala Kampung dan aparat kampung sebagai pelaksana administrasi. Mereka bertanggung jawab untuk menyiapkan alat bantu komunikasi dan informasi, seperti komputer dan telepon, guna memastikan adanya transmisi informasi yang terstruktur dan terdata. Pembagian tugas ini memudahkan pengawasan dan koordinasi antar aparat serta antara pemerintah kampung dengan masyarakat setempat. Komunikasi yang efektif dan sistematis menjadi salah satu kunci utama dalam kelancaran implementasi ADD di Kampung Moruku (Edwards III, 1980).

Selain itu, struktur birokrasi di Kampung Moruku melibatkan Badan Musyawara Kampung (BPK), tenaga teknis, dan pendamping lokal yang semuanya mendapatkan honor tetap sebagai tenaga pelaksana profesional. Hal ini menunjukkan adanya komitmen untuk membangun kapasitas sumber daya manusia dalam pemerintahan kampung. Menurut Sabatier (1986), keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada kualitas dan kompetensi aparat pelaksana. Dalam konteks Kampung Moruku, keberadaan tenaga teknis dan pendamping lokal sebagai bagian dari struktur birokrasi menunjukkan pentingnya keterlibatan individu yang memiliki keterampilan khusus untuk menerjemahkan dan mengimplementasikan kebijakan ADD dengan efektif. Mereka juga bertindak sebagai jembatan antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan masyarakat lokal.

Sistem konektivitas yang kuat antar perangkat kampung, mulai dari Kepala Kampung hingga anggota Badan Musyawara Kampung, menjadi aspek

penting dalam kelancaran penyelenggaraan pemerintahan kampung. Sistem ini menciptakan koordinasi yang baik antar semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan ADD. Dalam teori Edwards III, koordinasi yang efektif antar pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan (Edwards III, 1980). Jika sistem birokrasi di Kampung Moruku berjalan dengan baik, maka kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui ADD dapat dijalankan dengan lebih efektif, karena setiap pihak memiliki pemahaman dan peran yang jelas.

Namun, tantangan yang dihadapi adalah kualitas sumber daya manusia yang masih terbatas di Kampung Moruku. Meskipun jumlah perangkat kampung cukup banyak, kualitas kemampuan aparatur dalam menjalankan tugas-tugas administrasi dan teknis masih minim. Oleh karena itu, pemerintah kampung perlu terus berupaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan yang lebih intensif. Sebagai referensi, Sabatier dan Mazmanian (1980) menekankan bahwa ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas sangat berpengaruh pada pencapaian tujuan kebijakan. Dengan upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, struktur birokrasi yang ada di Kampung Moruku akan semakin efektif dalam mengimplementasikan program ADD dan pemberdayaan masyarakat.

Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Alokasi Dana Desa di Kampung Moruku Distrik Dekai Kabupaten Yahukimo

Faktor Pendukung

Faktor pendukung dalam implementasi program pemberdayaan masyarakat melalui Alokasi Dana Desa (ADD) di Kampung Moruku memiliki peran penting dalam memastikan keberhasilan kebijakan ini. Faktor-faktor ini meliputi dukungan pemerintah daerah, partisipasi aktif masyarakat, serta adanya lembaga atau organisasi yang dapat

memberikan pendampingan teknis dan manajerial. Dukungan dari pemerintah daerah sangat penting dalam menyediakan anggaran yang memadai, memberikan pelatihan kepada aparat kampung, serta menciptakan kebijakan yang mendukung proses implementasi. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program ADD juga menjadi faktor kunci dalam memastikan program tersebut sesuai dengan kebutuhan lokal. Selain itu, keberadaan lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau kelompok pendamping yang memiliki pengalaman dalam pemberdayaan masyarakat akan sangat membantu dalam meningkatkan kapasitas masyarakat dan aparat kampung dalam mengelola dana desa secara efektif. Keberadaan faktor pendukung ini sangat berpengaruh dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi implementasi ADD yang berkelanjutan.

Faktor pendukung yang terdapat dalam implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui Program Alokasi Dana Desa (ADD) di Kampung Moruku, seperti dana program, letak geografis, akses komunikasi, serta ketersediaan bahan bangunan, memainkan peran penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan program tersebut. Menurut Sudjana dan Haryanto (2019), salah satu faktor utama yang menentukan efektivitas pemberdayaan masyarakat adalah ketersediaan dana yang cukup untuk mendukung berbagai kegiatan yang akan dilakukan. Dalam hal ini, Alokasi Dana Desa memberikan sumber daya finansial yang dibutuhkan untuk membiayai berbagai program pemberdayaan, seperti pembangunan infrastruktur dasar, pelatihan keterampilan, dan kegiatan ekonomi yang melibatkan masyarakat setempat.

Letak Kampung Moruku yang dekat dengan Kota Dekai memberikan keuntungan strategis dalam hal aksesibilitas dan mobilitas. Akses jalan darat yang menghubungkan kampung dengan pusat kabupaten memungkinkan masyarakat untuk lebih mudah mengakses berbagai layanan publik, termasuk

pelayanan kesehatan dan pendidikan, serta mempermudah distribusi barang dan bahan kebutuhan lainnya. Menurut Ali (2021), aksesibilitas yang baik merupakan faktor penentu dalam keberhasilan implementasi kebijakan di daerah-daerah terpencil, karena memungkinkan interaksi antara masyarakat lokal dan pemerintah lebih efektif. Dengan adanya jalan yang menghubungkan Kampung Moruku dengan Dekai, pelaksanaan program ADD dapat berjalan lebih lancar dan mempermudah penyampaian informasi terkait kebijakan.

Ketersediaan infrastruktur komunikasi juga menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan ini. Kampung Moruku sudah dilengkapi dengan jaringan Telkomsel dan akses internet yang memadai, yang mendukung penyebaran informasi mengenai program pemberdayaan masyarakat. Sebagaimana dijelaskan oleh Nugroho dan Purnomo (2020), teknologi informasi dapat meningkatkan efisiensi komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, serta memfasilitasi pelaporan dan pemantauan program yang tengah dijalankan. Dengan adanya sarana komunikasi ini, pemerintah kampung dapat lebih mudah menyampaikan informasi kepada masyarakat serta memantau pelaksanaan program ADD, termasuk mengatasi hambatan yang mungkin muncul di lapangan.

Selain itu, keberadaan sumber daya alam yang melimpah di Kampung Moruku, seperti air, batu, dan kayu, menjadi faktor pendukung lainnya dalam implementasi pemberdayaan masyarakat. Keberagaman sumber daya ini memungkinkan masyarakat untuk lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan bahan bangunan serta mendukung kegiatan pembangunan yang bersifat lokal dan berkelanjutan. Menurut Sulaiman dan Riyanto (2018), ketersediaan sumber daya alam di tingkat desa dapat mengurangi ketergantungan pada bantuan eksternal dan meningkatkan kemandirian masyarakat dalam melaksanakan pembangunan. Hal ini sangat relevan dengan kondisi Kampung

Moruku, di mana masyarakatnya dapat memanfaatkan bahan-bahan alam sekitar untuk membangun infrastruktur dasar yang mendukung program pemberdayaan melalui ADD.

Faktor Penghambat

Faktor penghambat dalam implementasi kebijakan seringkali menjadi tantangan besar yang mempengaruhi keberhasilan suatu program, termasuk dalam hal pemberdayaan masyarakat melalui program Alokasi Dana Desa (ADD) di Kampung Moruku. Beberapa faktor penghambat yang sering dijumpai antara lain adalah keterbatasan sumber daya manusia, baik dalam hal kualitas maupun kuantitas aparatur pemerintahan kampung, serta rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya partisipasi dalam pengelolaan dana desa. Selain itu, kondisi geografis yang sulit dijangkau juga mempengaruhi mobilitas dan akses informasi yang dapat memperlambat distribusi dana dan pelaksanaan kegiatan. Hambatan lainnya adalah lemahnya koordinasi antara pemerintah kabupaten, distrik, dan kampung, yang dapat menyebabkan ketidakcocokan antara kebijakan yang ditetapkan dengan kebutuhan nyata di lapangan. Oleh karena itu, faktor-faktor penghambat ini perlu diidentifikasi dan diatasi untuk memastikan bahwa program ADD dapat berjalan efektif dan mencapai tujuan pemberdayaan yang diharapkan.

Faktor-faktor penghambat dalam implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui program Alokasi Dana Desa (ADD) di Kampung Moruku sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis yang sulit, khususnya pada musim hujan dan banjir. Kampung Moruku yang terletak di daerah rawa dan berairan memerlukan perhatian khusus terkait dengan aksesibilitas dan transportasi. Hal ini sesuai dengan temuan yang disampaikan oleh Edwards (1980), yang menjelaskan bahwa masalah sumber daya fisik dan infrastruktur, termasuk aksesibilitas, dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan

kebijakan. Ketika cuaca buruk melanda, mobilitas aparat pemerintah kampung dan masyarakat untuk melakukan kegiatan pembangunan terbatas, yang akhirnya memperlambat proses pemberdayaan. Oleh karena itu, diperlukan investasi dalam perbaikan infrastruktur transportasi untuk mengatasi tantangan ini dan mendukung keberhasilan program ADD di daerah tersebut.

Selain faktor aksesibilitas, rendahnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam program pemberdayaan juga menjadi penghambat utama. Masyarakat yang belum sepenuhnya memahami pentingnya partisipasi aktif dalam proses pembangunan sering kali enggan terlibat dalam kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa. Hal ini mengarah pada penerapan teori implementasi kebijakan oleh Van Meter dan Van Horn (1975), yang menekankan pentingnya sikap dan motivasi pelaksana serta penerima kebijakan dalam keberhasilan implementasi. Program pemberdayaan masyarakat akan lebih efektif jika ada kesadaran kolektif dan partisipasi aktif dari masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan dan sosialisasi mengenai manfaat program ADD perlu terus ditingkatkan untuk membangun pemahaman yang lebih baik di kalangan warga Kampung Moruku.

Minimnya sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi yang memadai dan kemampuan untuk mengelola program secara inovatif juga menjadi hambatan serius dalam implementasi kebijakan pemberdayaan di Kampung Moruku. Sumber daya manusia yang tidak profesional dan kurangnya tenaga ahli menyebabkan ketidakmampuan dalam mengelola program secara efisien dan efektif. Sebagai bagian dari kerangka implementasi kebijakan, Edwards III (1980) menekankan bahwa ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten adalah faktor kunci dalam keberhasilan suatu kebijakan. Di Kampung Moruku, meskipun jumlah tenaga kerja relatif banyak, kualitas sumber daya manusia yang terbatas dalam hal pendidikan dan keterampilan menjadi

kendala. Oleh karena itu, pemberian pelatihan dan pendidikan yang lebih baik kepada masyarakat dan aparat kampung sangat penting untuk memperkuat kapasitas mereka dalam mengelola program ADD.

Selain itu, tingginya harga barang dan jasa di Kabupaten Yahukimo juga turut memperburuk pelaksanaan program ADD di Kampung Moruku. Hal ini berkaitan dengan faktor ekonomi yang dapat mempengaruhi biaya operasional program pemberdayaan masyarakat. Biaya tinggi yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa dapat membatasi keberhasilan implementasi program, terutama di daerah terpencil yang memiliki keterbatasan ekonomi. Dalam konteks Kampung Moruku, mahalanya harga barang dan jasa memperburuk kondisi keuangan kampung, menghambat pembelian barang yang diperlukan untuk menunjang kegiatan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan yang lebih efisien dan kebijakan subsidi untuk barang dan jasa dasar mungkin perlu dipertimbangkan untuk meringankan beban biaya yang dihadapi masyarakat kampung.

KESIMPULAN

Implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui Program Alokasi Dana Desa (ADD) di Kampung Moruku, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo berdasarkan teori Edwards III, Indikator Komunikasi, Kurangnya pemahaman mengenai mekanisme pengelolaan dana dan kurangnya transparansi dalam penyampaian informasi menyebabkan kurangnya partisipasi aktif dari masyarakat. Diperlukan komunikasi yang lebih terbuka dan efektif dalam bentuk sosialisasi yang lebih intensif agar masyarakat dapat lebih memahami dan berkontribusi dalam pelaksanaan program ini.

Indikator Sumber Daya, Rendahnya kualitas tenaga kerja lokal, terbatasnya tenaga ahli, serta kurangnya fasilitas dan sarana transportasi memperlambat

pelaksanaan program. Untuk meningkatkan efektivitas ADD, diperlukan pelatihan yang berkelanjutan bagi masyarakat dan aparat kampung, serta peningkatan investasi dalam infrastruktur dasar yang mendukung aksesibilitas dan distribusi sumber daya.

Indikator Disposisi, Motivasi dan dedikasi aparat kampung dalam melaksanakan program sering kali terkendala oleh minimnya insentif serta kurangnya pengawasan dari pihak yang berwenang. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem insentif serta peningkatan mekanisme pengawasan untuk memastikan bahwa aparat kampung memiliki komitmen yang tinggi dalam menjalankan program ini.

Indikator Struktur Birokrasi, Kelembagaan yang kurang efektif serta tumpang tindih kewenangan sering kali menyebabkan keterlambatan dalam pengambilan keputusan dan eksekusi program. Untuk mengatasi hal ini, perlu adanya penyederhanaan prosedur administrasi dan peningkatan sinergi antara berbagai pihak terkait guna mempercepat proses implementasi kebijakan.

Kedua, Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui Program Alokasi Dana Desa (ADD) di Kampung Moruku, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo. Faktor Pendukung, Beberapa faktor yang mendukung implementasi ADD di Kampung Moruku meliputi adanya ketersediaan dana desa yang secara rutin dialokasikan oleh pemerintah pusat, lokasi kampung yang relatif dekat dengan pusat kabupaten, serta potensi sumber daya alam yang melimpah seperti kayu dan batu. Selain itu, adanya akses komunikasi yang cukup baik juga menjadi faktor positif dalam mendukung pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat.

Faktor Penghambat, Tantangan utama dalam implementasi ADD di Kampung Moruku antara lain kondisi geografis yang sulit, terutama saat musim hujan yang menghambat mobilitas dan

distribusi barang. Selain itu, rendahnya partisipasi masyarakat, minimnya tenaga profesional yang dapat mengelola program secara efisien, serta tingginya harga barang dan jasa di daerah Yahukimo menjadi hambatan signifikan dalam pelaksanaan program ini. Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur yang lebih baik, serta pengelolaan anggaran yang lebih efisien agar program ADD dapat berjalan dengan optimal.

REKOMENDASI RISET

Rekomendasi dari hasil penelitian ini, *Pertama*, bagi pemerintah, penting untuk meningkatkan infrastruktur aksesibilitas di Kampung Moruku dengan memperbaiki jalan dan jalur transportasi air guna mengatasi tantangan geografis dan cuaca buruk yang sering menghambat pelaksanaan program ADD. Selain itu, pelatihan berkala bagi aparat kampung dan masyarakat perlu menjadi prioritas agar kapasitas mereka dalam mengelola dana dan menjalankan program pemberdayaan meningkat. Pemerintah juga disarankan untuk memberikan subsidi atau insentif terhadap barang dan jasa yang diperlukan untuk pembangunan di kampung, mengingat tingginya harga di daerah Yahukimo yang menjadi hambatan tambahan dalam pelaksanaan program.

Kedua, bagi masyarakat Kampung Moruku, partisipasi aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan program ADD perlu ditingkatkan melalui musyawarah kampung, sehingga program yang dijalankan benar-benar sesuai dengan kebutuhan lokal. Masyarakat juga diharapkan dapat memanfaatkan sumber daya alam setempat, seperti kayu dan batu, secara berkelanjutan untuk mengurangi ketergantungan pada bantuan eksternal. Selain itu, pendidikan dan pemberdayaan generasi muda sangat penting dilakukan, misalnya melalui program beasiswa atau pelatihan keterampilan, agar mereka dapat menjadi tenaga profesional yang berkontribusi pada pembangunan kampung di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditra, I. P. & Maharani, D. (2018). Kapolda Papua: Salah Gunakan Dana Desa Akan Berurusan dengan Hukum. *Kompas*. Available at: <https://regional.kompas.com/read/2018/08/04/19001861/kapolda-papua-salah-gunakan-dana-des-a-kan-berurusan-dengan-hukum> diakses pada tanggal 4 Mei 2024.
- Aedah, N. (2017). Peran Dan Fungsi Kepemimpinan Informal Dalam Pemerintahan Kampung Di Kampung Waena Kota Jayapura. *Jurnal Ekologi Birokrasi*, 5(3), 1-10.
- Ali, M. (2021). *Peran Infrastruktur dalam Pemberdayaan Masyarakat di Daerah Terpencil*. *Jurnal Pembangunan dan Masyarakat*, 10(2), 115-129.
- Anderson. (2020, Maret). Sondegau : Dana Desa Bukan Milik Kepala Kampung. *DPR Papua*. Available at: <https://dpr-papua.go.id/sondegau-dana-des-a-bukan-milik-kepala-kampung/> diakses pada tanggal 4 Mei 2024.
- Banafanu, Y. L (2024, April). Dinas PMK Sorong ingatkan kepala kampung gunakan dana desa sesuai program. *Antra News*. Available at: <https://papuabarat.antarane.ws.com/berita/43527/dinas-pmk-sorong-ingatkan-kepala-kampung-gunakan-dana-des-a-sesuai-program> diakses pada tanggal 4 Mei 2024.
- Christoffel, Y., Batubara, Y. E., & Widagda, I. G. P. (2022). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Kampung pada Kampung Dekai Distrik Dekai Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua Pegunungan. *Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia*, 14(3), 169-178.
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Edwards, G. C. III. (1980). *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press.
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. Princeton University Press.
- Harianto, Rahardjo, M., Baru, B. M., Wiyaka, A. (2022). *Pengelolaan Dana Desa dan Tindak Pidana Korupsi. (Konsep, Aplikasi, dan Implementasinya)*. Surabaya: Dalle Nurul Utama.
- Haris, A. (2014). Memahami Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat. *Jupiter*, 13(2).
- Leo, H. J. (2021, Desember). Dana Desa Bukan Dana Kepala Desa. *DJPB Kemenkeu*. Available at: <https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/opini/3786-dana-des-a-bukan-dana-kepala-des-a.html> diakses pada tanggal 4 Mei 2024.
- McCool, D. C., & Guthrie, M. S. (2001). *The Implementation of Public Policy: A Framework for Analysis*. University of California Press.
- Noor, M. (2011). Pemberdayaan masyarakat. *CIVIS: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 1(2).
- Nugroho, D., & Purnomo, H. (2020). *Penggunaan Teknologi Informasi dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa*. *Jurnal Teknologi dan Masyarakat*, 5(1), 85-98.
- Nugroho, R. (2003). *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Nugroho, R. (2018). *Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Publik di Desa: Studi Kasus Alokasi Dana Desa*. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 13(2), 98-110.
- Rahmat, A., & Mirnawati, M. (2020). Model participation action research dalam pemberdayaan masyarakat. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 6(1), 62-71.
- Raya, G. M. (2024, Maret). Noak Tabo: Dana Desa Bukan Uang Pribadi Kepala Kampung, Harus Gunakan Sesuai Aturan dan Perencanaan. *Papua Bangkit*. Available at: <https://papuabangkit.com/2024/03/16/noak-tabo-dana-des-a-bukan-uang-pribadi-kepala-kampung-harus-gunakan-sesuai-aturan-dan-perencanaan/> diakses pada tanggal 4 Mei 2024.

- Rizqi, S. K., Muksin, D., & Pawane, A. R. (2024). Sosialisasi Pengelolaan Dana Desa di Kampung Husoak Distrik Hubikiak Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara*, 5(1), 1372-1381.
- Roosinda, F. W., & Prasetijowati, T. (2017). Permasalahan dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Intelektual: Jurnal Administrasi Publik dan Ilmu Komunikasi*, 4(2), 108-112.
- Sabatier, P. A. (1986). *Top-Down and Bottom-Up Approaches to Implementation Research: A Critical Analysis and Suggested Synthesis*. *Journal of Public Policy*, 6(1), 21-48.
- Sabatier, P. A., & Mazmanian, D. A. (1980). *The Implementation of Public Policy: A Framework of Analysis*. *Policy Studies Journal*, 8(4), 538-560.
- Sudjana, D., & Haryanto, B. (2019). *Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat: Studi Kasus di Jawa Barat*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 17(3), 210-220.
- Tanan, C. I., & Fonataba, B. F. (2022). Pengalokasian Dana Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Kampung Warbo. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 17(1), 135-150.
- Tanawi, A. (2024, April). Kepala Kampung di ingatkan jangan salah menggunakan dana Desa. RRI. Available at: <https://www.rri.co.id/daerah/624060/kepala-kampung-di-ingatkan-jangan-salah-menggunakan-dana-desa> diakses pada tanggal 4 Mei 2024.
- Utomo, T. W. W. (2004). Beberapa Permasalahan dan Upaya Akselerasi Program Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*, 1(1), 36-45.
- van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. *Administration & Society*, 6(4), 445-488.
- Weller, S. (1999). *Building Capacity for Sustainable Development: Learning from the Past, Designing for the Future*. Taylor & Francis.
- Yefni, Y. (2018). Analisis Model pemberdayaan masyarakat. *Masyarakat Madani: Jurnal Kajian Islam dan Pengembangan Masyarakat*, 3(2), 42-61.